



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
3. NHK : 485089

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.087.500.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>43.650.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO SPM Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANSA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA SPM Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.450.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>421.088.995</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.557.688.995
III. HUTANG	Rp.	2.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.555.288.995

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.